

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan nasional dan merupakan unsur kunci dalam penyelenggaraan sistem tersebut, yang dapat mengoptimalkan potensi pembangunan suatu daerah dan mencapai tujuan peningkatan kualitas pembangunan. Bentuk khusus untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah dengan di undangannya Undang-Undang Nomor 17 tentang keuangan Negara Tahun 2003, yang selanjutnya disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, otonomi daerah memberikan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Salah satu prasyarat untuk mencapai tujuan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan. Karena kegiatan pemerintah berada dalam lingkup pelaksanaan tanggung jawab masyarakat, maka pemerintah harus dapat menyediakan kepada publik segala informasi keuangan yang relevan, jujur dan terbuka.

Akuntabilitas oleh pemerintah daerah sangat penting karena merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah sebagai entitas yang mengelola dan bertanggung jawab atas penggunaan kekayaan daerah. Dalam konteks demokrasi, masyarakat sebagai pihak yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah berhak memperoleh informasi atas kinerja pemerintah. Dengan

adanya akuntabilitas pemerintah daerah, masyarakat dapat berperan dalam pengawasan atas kinerja pemerintah daerah.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggung jawaban yang harus dilaporkan dan dipertanggung jawabkan untuk mengukur kesuksesan maupun kegagalan sebagai bahan pertimbangan tahun berikutnya (Defana & Rahayu, 2023). Pengelolaan keuangan daerah dapat diukur dengan perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, pengawasan, (Baihaqi et al., 2023).

Fenomena akuntabilitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Seiring dengan perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia, maka wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan umum (Baihaqi et al., 2023). Dalam konteks pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa keuangan daerah agar dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Terkait pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), disebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

Upaya menerapkan pertanggung jawaban dalam mengelola keuangan daerah

bisa melalui penyampaian laporan dan pemanfaatan keuangan pemerintah daerah tanpa lebih dari jadwal yang ditentukan, serta pemanfaatan anggaran terlaksana secara efektif maupun efisien. Selama mengatur keuangan daerah, maka memerlukan standar akuntansi berdasar pada peraturan dan bisa diterima oleh khlayak umum. Laporan keuangan atas pelaksanaan pemerintah perlu ditunjang oleh bukti administrasi yang bisa masyarakat terima terkait transparansi laporan (Molle et al., 2023).

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan yang diberikan kepada pengguna dalam mengakses laporan keuangan dan tidak hanya kepada lembaga dan badan tertentu lainnya namun juga diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk kepercayaan pemerintah dalam mengelola keuangan (Fauziyah & Handayani, 2017). Melalui kemudahan dengan aksesibilitas laporan keuangan daerah tersebut diharapkan masyarakat dapat memberikan evaluasi terhadap pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Aksesibilitas Laporan Keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan berhak mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah, penggunaan informasi keuangan yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami yaitu dapat dilakukan dengan efisien melalui media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi dan website (internet) pemerinta

Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) sendiri telah memperoleh opini wajar

tanpa pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap laporan keuangan daerah kabupaten OKU. Permasalahan yang lain yang sering terjadi yaitu pencatatan aset yang belum lengkap, tidak akurat dan tidak didukung dengan data yang mudah ditemukan. Fenomena yang terjadi ini berkaitan dengan aksesibilitas yaitu seiring perkembangan ilmu dan teknologi digital mempermudah publik mengakses berbagai informasi, mulai dari sosial, hukum dan budaya termasuk juga pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang jelas disebutkan salah satunya yaitu pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui media massa maupun via internet sehingga masyarakat dapat mengetahui atau mengaksesnya dengan mudah mengenai informasi keuangannya.

Akuntabilitas terkait laporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan. Dalam hal ini, aksesibilitas laporan keuangan juga memiliki keterkaitan didalamnya, akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggung jawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam hal ini laporan yang mengandung informasi yang relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna dan laporan yang secara langsung tersedia dan mudah di akses.

Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan penggunaan informasi keuangan, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, akan tetapi juga

karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial.

Banyak pihak yang mengandalkan informasi laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, oleh karena itu untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Adanya penerapan kebijakan akuntansi berbasis akrual dalam laporan keuangan lebih berat dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang benar-benar memahami logika akuntansi.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dipemerintah kabupaten OKU pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) khususnya mengenai akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan. Berdasarkan fenomena dari opini laporan keuangan, pemerintah kabupaten OKU mengindikasikan adanya upaya untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dalam hal ini sistem aksesibilitas laporan keuangan yang ada di BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Dalam rangka melihat kendala yang masuk ke aksesibilitas laporan keuangan, untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten Ogan Komering Ulu”**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan informasi tentang Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu, serta sebagai acuan dan pertimbangan bagi penelitian sebelumnya.

b. Manfaat Praktis

1. Memberi sumbangan referensi bagi pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan mengenai akuntabilitas laporan keuangan.
2. Memberi sumbangan referensi bagi organisasi sektor publik yang

berwenang dalam menentukan pedoman penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam kaitanya dengan akuntabilitas dalam usahanya mengurangi praktek korupsi yang banyak terjadi di organisasi sektor publik di Kabupaten Ogan Komeing Ulu.